

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Manajemen Keuangan

##### 1. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen keuangan (*financial management*) adalah segala aktivitas organisasi yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola aset sesuai tujuan organisasi secara menyeluruh<sup>13</sup>. Manajemen keuangan merupakan pengendalian atas fungsi-fungsi keuangan. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, dengan hasil yang secara kualitatif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka pengertian manajemen menurut beberapa para ahli diatas adalah suatu seni dalam proses perencanaan, pengawasan, pengendalian, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian anggota organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama.

---

<sup>13</sup> Saefullah, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012),21.

<sup>14</sup> Ibrahim, Bafadal, *Pengelolaan Keuangan Sekolah*, (Jakarta : Bumi Aksara,2009)

## 2. Fungsi Manajemen

Kegiatan manajemen tidak dapat lepas dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Penjelasan mengenai fungsi manajemen menurut teori George R Terry adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

George R. Terry mengidentifikasi empat fungsi dasar manajemen yang dikenal dengan POAC, singkatan dari *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan/Pengarahan), dan *Controlling* (Pengawasan). POAC merupakan kerangka kerja yang sering digunakan dalam manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>16</sup>

### a. *Planning* (Perencanaan):

Merupakan tahap awal yang memprioritaskan penentuan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

### b. *Organizing* (Pengorganisasian):

Tahap yang melibatkan penentuan struktur organisasi, pembagian tugas, dan penugasan sumber daya untuk mendukung rencana.

### c. *Actuating* (Pelaksanaan/Pengarahan):

Proses menggerakkan dan memotivasi anggota organisasi untuk melaksanakan rencana dan tugas yang telah ditentukan.

### d. *Controlling* (Pengawasan)

Dalam manajemen keuangan sekolah adalah proses memantau dan mengevaluasi penggunaan dana agar sesuai rencana, prosedur, dan

---

<sup>15</sup> George R. Terry, "Principles of Management," in *Teori Manajemen / Manajemen Strategik*, 6th ed. (1971).

<sup>16</sup> George R. Terry, "Principles of Management."

tujuan. Pengawasan dilakukan secara internal (oleh kepala sekolah, bendahara, tim manajemen) dan eksternal (oleh pengawas sekolah, komite, pemerintah) melalui laporan keuangan, bukti transaksi, dan dokumentasi. Tujuannya memastikan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta mencegah penyimpangan penggunaan dana.

## **B. Manajemen Keuangan Sekolah**

### **1. Pengertian Manajemen Keuangan Sekolah**

Kuangan sekolah merupakan sesuatu simbol yang sangat menarik bagi seluruh warga sekolah. Banyak warga sekolah yang berkeinginan untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan sekolah, bahkan tidak sedikit juga yang selaluingin tahu mengenai pemakaian dana-dana sekolah.<sup>17</sup>

Manajemen keuangan sekolah merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan<sup>18</sup>.

Menurut H. M. Levin, yang dikutip oleh Uhar mengatakan, *“School finance refers to the process by which tax revenues and other resources are derived for the information and operation of elementary and secondary schools as well as the process by which those resources are allocated to school indifferent geographical area and to types and levels of”*.

---

<sup>17</sup> Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, (Jogyakarta : Ar-Ruzz Media,2010),181.

<sup>18</sup> Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta : Surayajaya Press,2007),90.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat penulis simpulkan bahwa manajemen keuangan sekolah adalah bagian dari pembiayaan pendidikan yang tercermin dari anggaran yang ditetapkan oleh sekolah, serta teknik memperoleh dana dan mengalokasikan dana dalam lingkungan yang berbeda dengan tingkat pendidikan yang berbeda pula.

Anggaran pada dasarnya terdiri dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisipengeluaran. Sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya danayang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Besannya, dalam pembahasانبiaya pendidikan, sumber-sumber biaya itu dibedakan dalam tiap golongan,yaitu pemerintah, masyarakat, orangtua dan sumber sumber lain<sup>19</sup>.

a. Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan

Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun kedua-duanya yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Besarnya biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah ditentukan berdasarkan kebijakan keuangan pemerintah ditingkat pusat dan daerah setelah mempertimbangkan skala prioritas. Jadi sumber pembiayaan yang dari pemerintah pusat masi humum dapat berupa uang sarana dan prasarana, buku dan sebagainya

b. Orang Tua atau Peserta Didik

Sumber pendanaan pendidikan Islam tidak terlepas dari kontribusi orang tua siswa ini kemungkinan merupakan keharusan

---

<sup>19</sup> NanangFattah. *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung, Rosdakarya,2006),48

karena pemerintah belum mampu mendanai seluruh kebutuhan dasar dana sekolah.

## 2. Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah

Kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien tujuan manajemen keuangan sekolah diantaranya adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, untuk meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.<sup>20</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menepatkan bendahara yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung jawab keuanhan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku<sup>21</sup>.

## 3. Fungsi Manajemen Keuangan Sekolah

Manajemen keuangan sekolah memiliki peranan penting dalam menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan pendidikan.

Fungsi-fungsi utama manajemen keuangan di lingkungan sekolah mencakup:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> F. Lubis, M. F., Mais, R. G., Ardheta, P. A., Mulyati, A., & Maliki, "Analysis of Accountability and Transparency in the Management of School Operational Assistance Funds," *Manajemen Keuangan Pendidikan / Transparansi & Akuntabilitas BOS*. 1, no. 1 (2024): 83–94.

<sup>21</sup> Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 168.

<sup>22</sup> Mulyasa, "Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan," *Manajemen Keuangan Pendidikan* 2, No. 3 (2013): 27.

a. Perencanaan Keuangan (*Planning*)

Perencanaan keuangan sekolah (*Financial Planning*) adalah tahap awal dan krusial dalam manajemen keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran berdasarkan kebutuhan operasional dan pengembangan sekolah. Proses ini dilakukan secara sistematis dan rasional agar prioritas sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

b. Pengorganisasian Keuangan (*Organizing*)

Pengorganisasian keuangan adalah proses membagi dan menata tugas serta wewenang dalam struktur yang terstruktur untuk mendukung pengelolaan dana sekolah secara tertib, efisien, dan sesuai prosedur. Ini menjadi fondasi agar setiap peran, mulai dari bendahara hingga staf keuangan administratif, bekerja secara harmonis dan terpadu.

c. Pelaksanaan atau Penggunaan Dana (*Actuating*)

Pelaksanaan atau Penggunaan Dana (*Actuating*) adalah tahap manajemen keuangan sekolah di mana rencana anggaran yang telah disusun dilaksanakan dengan menggerakkan seluruh pihak terkait yaitu, kepala sekolah, bendahara, guru, dan staf agar bekerja sesuai tugasnya. Dana digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah, pengadaan sarana, dan kebutuhan operasional secara efektif, efisien, dan sesuai prioritas, sehingga tujuan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai.

d. Pengawasan dan Pengendalian (*Controlling*)

*Controlling* adalah proses memantau, memeriksa, dan mengevaluasi penggunaan dana sekolah untuk memastikan bahwa

pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Tahap ini bertujuan mencegah penyalahgunaan dana, mendeteksi penyimpangan sedini mungkin, serta menjamin akuntabilitas dan transparansi. Kegiatan ini melibatkan pencatatan yang tertib, pelaporan keuangan secara berkala, dan audit internal atau eksternal agar pengelolaan keuangan berjalan efektif serta mendukung peningkatan mutu pendidikan.

e. Evaluasi Keuangan (*Evaluating*)

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dalam mencapai tujuan pendidikan. Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan untuk perencanaan keuangan selanjutnya.

4. Pengelolaan Keuangan Sekolah

Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Dalam tataran pengelolaan *Costa* memperlihatkan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan penyampaian umpan balik.<sup>23</sup>

Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, di mana, kapan dan berapa lama akan dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya. Kegiatan pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya. Kegiatan pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat apa yang

---

<sup>23</sup> Vincen P. Costa, "Penjelasan Costa Mengenai Pengelolaan Aliran Dana Sekolah," *Teori Manajemen Keuangan Sekolah / Produksi Pendidikan* 2, no. 3 (2000): 175.

dikerjakan dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan mengaturnkriterianya, teknik pelaksanaan dan akan dilakukan oleh siapa. Kegiatan umpan balik merumuskan kesimpulan dan saran-saran untuk kesinambungan terselenggaranya Manajemen Operasional Madrasah.<sup>24</sup>

Penyusunan rencana (*planning*) di dalam setiap penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisis berbagai aspek yang berhubungan erat dengan pola perencanaan anggaran, yang didasarkan pertimbangan kondisi keuangan, *line of bussines*, keadaan konsumen, organisasi pengelola dan *skill* para pejabat sekolah<sup>25</sup>. Proses pengelolaan keuangan sekolah meliputi:

- a. Perencanaan anggaran
- b. Strategi mencari sumber dana sekolah
- c. Penggunaan keuangan sekolah
- d. Pengawasan dan evaluasi anggaran
- e. Pertanggungjawaban

Pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) ada beberapa hal yang berhubungan dengan penyusunan RAPBS, antara lain penerimaan, penggunaan dan pertanggung jawaban.

## 5. Komponen Manajemen Keuangan Sekolah

Komponen pertama dalam manajemen keuangan sekolah adalah

---

<sup>24</sup> Syaiful Sagala & Deni Kuswara, "Memahami Organisasi Pendidikan (Sagala); Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan," *Manajemen Pendidikan / Organisasi Pendidikan & Mutu Pendidikan*, 2009, 287.

<sup>25</sup> ManahanTampolon, *Perencanaan Dan Keuangan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 233.

perencanaan anggaran, yang mencakup penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM). Perencanaan ini menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan karena menentukan alokasi dana yang diperlukan untuk setiap program dan kegiatan sekolah selama satu tahun anggaran. Dengan RKAM yang baik, sekolah dapat mengantisipasi kebutuhan dana secara tepat sehingga pengelolaan keuangan berjalan efektif dan efisien. Perencanaan anggaran yang matang membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana sekolah, khususnya dana BOS.<sup>26</sup>

Komponen kedua adalah pelaksanaan anggaran, yakni proses realisasi kegiatan yang telah direncanakan dalam RKAM. Pada tahap ini, sekolah harus memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan program yang telah disusun tanpa menyimpang dari aturan yang berlaku. Efektivitas pelaksanaan anggaran berpengaruh langsung terhadap pencapaian tujuan pendidikan dan penggunaan dana yang optimal. Pelaksanaan anggaran yang baik menuntut koordinasi yang solid antara kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah agar proses berjalan transparan dan akuntabel.<sup>27</sup>

Selanjutnya, terdapat komponen penatausahaan dan pembukuan, yang merupakan proses pencatatan secara sistematis seluruh transaksi keluar-masuk dana sekolah. Penatausahaan yang rapi sangat penting untuk mendukung akuntabilitas dan kemudahan dalam pengawasan keuangan. Pembukuan yang tepat memungkinkan sekolah mengontrol penggunaan

---

<sup>26</sup> Putra, A., & Widodo, R. (2021). Peran Perencanaan Anggaran dalam Manajemen Keuangan Sekolah: Studi pada Sekolah Dasar Negeri di Jakarta. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 8(2), 120-130.

<sup>27</sup> Sari, D. P., & Nugroho, H. (2021). Pelaksanaan Anggaran Sekolah dan Pengaruhnya terhadap Efektivitas Penggunaan Dana BOS. *Jurnal Pendidikan dan Keuangan*, 7(1), 55-68.

dana secara *real time* serta mempermudah penyusunan laporan keuangan. Pencatatan keuangan yang akurat dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan stakeholder<sup>28</sup>.

Komponen keempat adalah pelaporan dan pertanggung jawaban, yang sekolah wajib menyusun laporan penggunaan dana secara berkala kepada pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, dan masyarakat. Laporan ini menjadi bukti transparansi dan akuntabilitas sekolah dalam mengelola dana publik. Pelaporan yang tepat waktu dan sesuai prosedur juga mendukung proses evaluasi dan pengambilan kebijakan ke depan. Pelaporan yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sekolah dan berkontribusi terhadap keberlangsungan dana pendidikan.<sup>29</sup>

Komponen pengawasan dan evaluasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan. Audit internal dan eksternal dilakukan untuk mendeteksi ketidaksesuaian, kesalahan, atau potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana. Pengawasan ini penting untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan dan memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Pengawasan yang ketat serta evaluasi berkelanjutan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan sekolah serta menjamin akuntabilitas publik.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Rahmawati, L., & Santoso, B. (2021). Penatausahaan dan Pembukuan Dana BOS dalam Meningkatkan Akuntabilitas Sekolah. *Jurnal Akuntansi Pendidikan*, 10(3), 210-222.

<sup>29</sup> Prasetyo, M., & Haryanto, S. (2021). Pelaporan Keuangan Sekolah dan Transparansi Dana BOS. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Keuangan*, 5(4), 87-99.

<sup>30</sup> Wahyuni, T., & Fadli, M. (2021). Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Sekolah: Perspektif Audit Internal. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Manajemen*, 12(1), 45-60.

## 6. Sumber Dana Sekolah

Sumber dana yang dikelola oleh sekolah memiliki peranan penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional, pengadaan sarana dan prasarana, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekolah. Ketersediaan dan kelancaran aliran dana sangat berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran dan manajemen sekolah secara keseluruhan.<sup>31</sup> Oleh karena itu, sekolah harus mampu mengelola berbagai sumber dana yang tersedia dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Salah satu sumber utama dana sekolah adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan langsung ke rekening sekolah untuk mendukung kegiatan operasional non-personalia<sup>32</sup>. Dana ini mencakup pembiayaan seperti pengadaan alat tulis, kegiatan ekstrakurikuler, langganan listrik dan air, serta perawatan fasilitas sekolah. Menurut Permendikbud No. 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis BOS, penggunaan dana BOS harus berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) dan wajib dilaporkan secara periodik. BOS menjadi salah satu pilar utama pembiayaan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>H. A. Prasetyo dan D. P. Lestari, "Strategi Manajemen Dana Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 10, no. 1, hlm. 33–41, 2021.

<sup>32</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis BOS*, 2022.

<sup>33</sup> Riset dan Teknologi Republik Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

Selain BOS, sekolah juga dapat memperoleh dana dari pemerintah daerah. Dana ini biasanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan diberikan dalam bentuk hibah atau bantuan operasional tambahan.<sup>34</sup> Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan dukungan keuangan guna meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya, seperti melalui program beasiswa daerah, bantuan untuk guru honorer, atau pembangunan infrastruktur.<sup>35</sup>

Selanjutnya, sumbangan atau partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu sumber pendanaan sekolah. Sumbangan ini bisa berupa uang, barang, maupun jasa, yang diberikan oleh orang tua siswa, alumni, atau pihak lain yang peduli terhadap kemajuan pendidikan.<sup>36</sup> Meskipun diperbolehkan, penggalangan sumbangan harus mematuhi prinsip sukarela, tidak mengikat, dan tidak memaksa sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Pengelolaan dana masyarakat harus dilakukan secara transparan dan dilaporkan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.<sup>37</sup>

Selain itu, sekolah juga dapat memperoleh pendapatan dari kegiatan usaha sekolah, seperti kantin, koperasi siswa, hasil praktik

---

63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan,” 23 Desember 2022, 2022, [https://peraturan.bpk.go.id/Details/280985/permendikbudriset-no-63-tahun-2022?utm\\_source=chatgpt.com](https://peraturan.bpk.go.id/Details/280985/permendikbudriset-no-63-tahun-2022?utm_source=chatgpt.com).

<sup>34</sup> N. Wahyuni dan R. Hidayat, “Analisis Efektivitas Penggunaan Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan,” *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, vol. 18, no. 2, hlm. 120–129, 2021.

<sup>35</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah*, 2016.

<sup>36</sup> S. Ramadhani dan T. Yuliana, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pendanaan Pendidikan Dasar,” *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Daerah*, vol. 3, no. 1, hlm. 55–66, 2021.

<sup>37</sup> I. Rahmawati dan H. Suharto, “Peran Komite Sekolah dalam Mendukung Pengelolaan Dana Pendidikan,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 9, no. 1, hlm. 77–88, 2021.

kewirausahaan, dan pemanfaatan aset sekolah.<sup>38</sup> Dana dari usaha sekolah umumnya digunakan untuk mendukung kegiatan kesiswaan atau pengembangan sarana penunjang. Terakhir, terdapat juga sumber dana lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan, misalnya hibah dari lembaga donor, kerja sama dengan institusi lain, atau CSR dari perusahaan.<sup>39</sup> Setiap dana yang diterima sekolah, apapun sumbernya, wajib dikelola secara akuntabel dan diawasi oleh pihak internal maupun eksternal.

## 7. Pelaksanaan Keuangan Sekolah

Pelaksanaan keuangan sekolah merupakan tahap implementasi dari rencana anggaran yang telah disusun dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM). RKAM menjadi dokumen acuan utama yang mencerminkan seluruh program dan kebutuhan dana selama satu tahun ajaran. Proses pelaksanaan anggaran ini bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah agar berjalan secara efektif dan efisien.<sup>40</sup> Oleh karena itu, pelaksanaannya harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan keuangan sekolah, setiap pengeluaran harus mengacu pada RKAM yang telah disetujui oleh pihak terkait, seperti komite sekolah dan dinas pendidikan.<sup>41</sup> Hal ini penting untuk memastikan

---

<sup>38</sup> Santoso dan L. Mukarromah, "Potensi Kewirausahaan Sekolah sebagai Sumber Dana Alternatif," *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, vol. 5, no. 2, hlm. 91–100, 2021.

<sup>39</sup> L. M. Sari dan H. Nugroho, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah," *Jurnal Pendidikan dan Akuntabilitas Publik*, vol. 7, no. 3, hlm. 140–153, 2021.

<sup>40</sup> H. A. Prasetyo dan D. P. Lestari, "Strategi Manajemen Dana Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 10, no. 1, hlm. 33–41, 2021.

<sup>41</sup> N. Wahyuni dan R. Hidayat, "Analisis Efektivitas Penggunaan Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan," *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, vol. 18, no. 2, hlm. 120–129, 2021.

bahwa penggunaan dana benar-benar sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Setiap pengeluaran wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti nota, kwitansi, dan bukti pembayaran lainnya. Proses pencairan dana juga harus melalui mekanisme yang tertib dan terdokumentasi untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.

Peran bendahara sekolah sangat krusial dalam tahap pelaksanaan ini. Bendahara bertanggung jawab untuk mencatat setiap transaksi keuangan secara rinci dan akurat. Ia juga harus memastikan bahwa pengeluaran dilakukan berdasarkan persetujuan kepala sekolah dan bukti administrasi yang sah. Selain itu, bendahara perlu menjaga pembukuan agar dapat diaudit kapan saja, baik oleh internal sekolah maupun auditor dari instansi pemerintah. Fungsi administratif bendahara sangat menentukan kelancaran dan ketertiban pengelolaan keuangan di sekolah.

Kepala sekolah, sebagai penanggung jawab tertinggi di satuan pendidikan, memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan anggaran. Kepala sekolah harus memastikan bahwa seluruh kegiatan pembelanjaan sesuai dengan prioritas program yang telah dirancang. Ia juga bertanggung jawab dalam menandatangani dokumen-dokumen penting seperti permohonan pencairan, laporan penggunaan anggaran, dan pernyataan pertanggungjawaban. Selain itu, kepala sekolah harus membangun sistem pengendalian internal agar tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan dana.

Pelaksanaan keuangan sekolah yang baik akan memberikan dampak positif terhadap efektivitas kegiatan belajar mengajar. Kegiatan

yang direncanakan dapat berjalan tepat waktu, fasilitas dapat diperbarui sesuai kebutuhan, dan seluruh warga sekolah dapat merasakan manfaat dari dana yang dikelola.<sup>42</sup> Sebaliknya, pelaksanaan anggaran yang tidak tertib akan berpotensi menimbulkan masalah, mulai dari keterlambatan kegiatan hingga temuan audit yang merugikan reputasi sekolah. Oleh karena itu, pelaksanaan keuangan harus selalu dievaluasi secara berkala agar sesuai dengan prinsip *good governance* dalam pendidikan.

#### 8. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahapan penting dalam manajemen keuangan sekolah yang mencerminkan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Setiap dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah, baik yang berasal dari pemerintah maupun sumber lain, wajib dilaporkan secara terbuka dan sistematis. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memastikan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun dan mendapat persetujuan dari pihak-pihak terkait.<sup>43</sup> Dengan adanya pelaporan yang rutin, sekolah dapat mempertahankan kepercayaan publik dan menjaga kredibilitas lembaga pendidikan.

Sekolah wajib menyusun laporan realisasi anggaran yang memuat rincian pemasukan dan pengeluaran dana dalam satu periode tertentu. Laporan ini mencakup penggunaan dana BOS, dana dari pemerintah daerah, sumbangan masyarakat, serta pendapatan dari kegiatan usaha

---

<sup>42</sup> L. M. Sari dan H. Nugroho, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah," *Jurnal Pendidikan dan Akuntabilitas Publik*, vol. 7, no. 3, hlm. 140–153, 2021.

<sup>43</sup> Z. Arifin, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri," *Jurnal Administrasi Pendidikan* 8, no. 2 (2021): 112–123.

sekolah. Semua dokumen keuangan harus disusun berdasarkan bukti transaksi yang valid dan dicatat secara tertib dalam pembukuan keuangan.<sup>44</sup> Selain itu, pelaporan harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah, misalnya melalui Aplikasi RKAM Online atau sistem informasi keuangan pendidikan lainnya yang resmi digunakan.

Proses pelaporan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada para pemangku kepentingan, seperti Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, dan masyarakat umum.<sup>45</sup> Oleh karena itu, laporan keuangan harus disampaikan secara terbuka dalam forum-forum tertentu, misalnya dalam rapat tahunan komite atau kegiatan evaluasi sekolah. Transparansi dalam pelaporan akan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan pendidikan di sekolah. Pengelolaan laporan keuangan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban kepada stakeholder, tetapi juga menjadi dasar dalam memenuhi kewajiban fiskal lembaga. Ketepatan dalam penyusunan laporan keuangan akan berdampak langsung terhadap akurasi estimasi pajak serta kualitas laporan keuangan secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan penelitian Weny (2022) yang menyatakan bahwa laporan keuangan fiskal memiliki peranan penting sebagai dasar dalam menghitung estimasi pajak, sehingga kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dapat berimplikasi pada ketidaktepatan

---

<sup>44</sup> M. Fadli dan S. Haryanto, "Sistem Pelaporan Keuangan Sekolah: Studi pada Sekolah Menengah Pertama di Jawa Timur," *Jurnal Manajemen Pendidikan* 11, no. 1 (2022): 45–58.

<sup>45</sup> R. Hidayat dan D. K. Sari, "Transparansi Keuangan Sekolah dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah," *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan* 5, no. 3 (2021): 77–89.

perhitungan pajak dan mempengaruhi kredibilitas laporan keuangan lembaga<sup>46</sup>. Oleh karena itu, transparansi, akurasi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi menjadi aspek krusial dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam konteks lembaga pendidikan. Hal ini juga menjadi cerminan bahwa sekolah tidak menyembunyikan informasi keuangan, serta bersedia menerima masukan atau koreksi.

Pertanggungjawaban dalam konteks keuangan sekolah tidak hanya bersifat vertikal kepada pemerintah, tetapi juga bersifat horizontal kepada warga sekolah dan masyarakat.<sup>47</sup> Kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama harus memberikan penjelasan secara rinci atas penggunaan dana, termasuk jika terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian. Bendahara sekolah juga berperan penting dalam memastikan dokumen pertanggungjawaban keuangan disusun tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jika pertanggungjawaban tidak dilakukan dengan benar, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi administratif hingga sanksi hukum.

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik akan memperkuat sistem tata kelola sekolah berbasis akuntabilitas dan transparansi.<sup>48</sup> Sekolah yang konsisten dalam pelaporan akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan untuk menerima bantuan dari pihak luar, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Selain itu, pelaporan yang

---

<sup>46</sup> S. Y. Weny, "Perlakuan Laporan Keuangan Fiskal Sebagai Dasar Untuk Menghitung Estimasi Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Kent Transindo Indonesia (Platinum Logistic Gerai)," *Journal of Syntax Literate* 7, no. (10) (2022).

<sup>47</sup> I. G. A. Kusuma dan N. M. Putra, "Evaluasi Pelaporan Keuangan Sekolah Berbasis Sistem Informasi Keuangan," *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan* 14, no. 1 (2023): 20–34.

<sup>48</sup> A. Santoso dan F. Rahman, "Peran Komite Sekolah dalam Mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS," *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* 6, no. 2 (2020): 99–110.

akurat juga menjadi dasar evaluasi dalam pengambilan keputusan keuangan tahun berikutnya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi sangat penting agar proses ini dapat berjalan dengan optimal.

## 9. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi dalam manajemen keuangan sekolah merupakan aspek penting untuk memastikan dana yang dikelola digunakan secara tepat, efisien, dan akuntabel. Pengawasan internal menjadi langkah pertama yang dilakukan oleh pihak sekolah, khususnya kepala sekolah dan bendahara. Mereka bertanggung jawab langsung untuk memantau seluruh proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.<sup>49</sup> Dengan adanya pengawasan internal yang ketat, potensi kesalahan atau penyalahgunaan dana dapat diminimalisir sejak awal.

Selain pengawasan internal, pengawasan eksternal juga menjadi bagian integral dalam manajemen keuangan sekolah. Pengawasan eksternal ini biasanya dilakukan oleh tim auditor yang berasal dari Dinas Pendidikan atau instansi terkait lainnya. Auditor ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan sekolah guna memastikan bahwa pengelolaan dana sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Keterlibatan pihak eksternal ini memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam

---

<sup>49</sup> Anwar, F., & Setiawan, D., "Pengawasan Keuangan Sekolah dan Dampaknya terhadap Transparansi Pengelolaan Dana," *Jurnal Pendidikan dan Manajemen*, vol. 9, no. 2, 2022, hlm. 88–99.

pengelolaan keuangan sekolah.<sup>50</sup>

Evaluasi pengelolaan keuangan biasanya dilakukan secara berkala, khususnya pada akhir tahun anggaran. Proses evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaan dana sekolah. Dengan evaluasi yang baik, sekolah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat melakukan perbaikan di tahun berikutnya. Selain itu, evaluasi juga menjadi dasar untuk pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan perencanaan anggaran dan penggunaan dana di masa mendatang.<sup>51</sup>

Secara praktik, pengawasan dan evaluasi harus melibatkan berbagai pihak agar hasilnya lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepala sekolah dan bendahara perlu berkoordinasi secara intensif untuk memastikan semua data dan dokumen keuangan terdokumentasi dengan baik. Sementara itu, auditor eksternal tidak hanya memeriksa administrasi, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan yang berguna untuk meningkatkan tata kelola keuangan sekolah. Pendekatan kolaboratif ini menjadi kunci keberhasilan pengawasan dan evaluasi keuangan di lingkungan sekolah.<sup>52</sup>

Pengawasan dan evaluasi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan semua pemangku kepentingan, mulai dari guru, orang tua,

---

<sup>50</sup> Haris, M., & Nugroho, B., "Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Menengah Pertama," *Jurnal Akuntansi Pendidikan*, vol. 7, no. 3, 2021, hlm. 105–117.

<sup>51</sup> Lestari, P., & Wijaya, S., "Peran Auditor Internal dalam Pengawasan Keuangan Sekolah Dasar," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pendidikan*, vol. 10, no. 1, 2023, hlm. 45–56.

<sup>52</sup> Mulyani, R., & Prasetyo, H., "Strategi Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS untuk Meningkatkan Akuntabilitas Sekolah," *Jurnal Pendidikan Nasional*, vol. 12, no. 4, 2020, hlm. 77–88.

hingga pemerintah.<sup>53</sup> Kepercayaan ini sangat penting agar dana yang diberikan kepada sekolah dapat terus meningkat dan digunakan secara optimal untuk mendukung mutu pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi utama dalam pembangunan pendidikan yang berkelanjutan di sekolah.

## 10. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan

Berikut adalah prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan:<sup>54</sup>

### a. Transparansi

Semua proses pengelolaan keuangan harus terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi tentang sumber dana, alokasi, penggunaan, dan laporan pertanggungjawaban harus disampaikan secara jelas dan lengkap.

### b. Akuntabilitas

Setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan moral. Pengelola keuangan sekolah harus mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan menunjukkan bukti yang sah atas setiap transaksi.

### c. Efisiensi

Dana yang dimiliki sekolah harus digunakan secara hemat, tanpa pemborosan, dengan hasil maksimal. Prioritas anggaran diberikan pada kegiatan yang memberikan manfaat besar bagi

---

<sup>53</sup> Sari, D., & Utami, R., "Implementasi Sistem Pengawasan Keuangan Sekolah Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pengelolaan Sekolah*, vol. 5, no. 2, 2021, hlm. 130–142.

<sup>54</sup>I. Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

peningkatan mutu pendidikan.

d. Efektivitas

Penggunaan dana harus tepat sasaran dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pengeluaran harus diarahkan untuk mendukung program-program utama sekolah, seperti proses pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, dan pengembangan sarana prasarana.

## 11. Efektivitas Keuangan Sekolah

Efektivitas keuangan sekolah merujuk pada sejauh mana pengelolaan dana pendidikan dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran dan operasional sekolah secara optimal. Keuangan sekolah dikatakan efektif apabila perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana dilakukan secara tepat sasaran, sesuai dengan rencana kegiatan, dan menghasilkan dampak positif terhadap mutu pendidikan.<sup>55</sup>

Efektivitas ini dapat dilihat dari beberapa indikator utama, antara lain: (1) kesesuaian penggunaan anggaran dengan prioritas program sekolah, (2) ketepatan waktu pencairan dan pelaksanaan kegiatan, (3) efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, serta (4) hasil nyata terhadap peningkatan proses dan hasil belajar siswa.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Mulyasa, "Manajemen Berbasis Sekolah," in *Buku Teks Pendidikan/Manajemen Sekolah* (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017).

<sup>56</sup> Maman Suherman & Entis Sutisman Teti Hartati, Helmawati, "Efektivitas Manajemen Pembiayaan Sekolah Dalam Penggunaan Dana BOS Di SDN Babakan Tanjung," *Manajemen Pembiayaan Sekolah / Evaluasi Efektivitas* 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.25981>.

## C. Mutu Pendidikan

### 1. Definisi Mutu Pendidikan

Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat. Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* (dapat dipegang) maupun yang *intangibile* (tidak dapat dipegang).<sup>57</sup>

Suryosubroto menyatakan bahwa, sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi yang tidak dapat diungguli. Produk yang bermutu adalah sesuatu yang dibuat dengan sempurna dan dengan biaya yang mahal. Produk tersebut dapat dinilai serta membuat puas dan bangga para pemiliknya. Mutu dalam pandangan ini digunakan untuk menyampaikan keunggulan status dan posisi, dan kepemilikan terhadap barang yang memiliki “mutu” akan membuat pemiliknya berbeda dari orang lain yang tidak mampu memilikinya.<sup>58</sup>

Penyelenggaraan layanan belajar bagi peserta didik biasanya dikaji dalam konteks mutu pendidikan yang erat hubungannya dengan kajian kualitas manajemen dan sekolah efektif. Komite Sekolah atau Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat

---

<sup>57</sup> Rini, “Pengertian Mutu Secara Umum Dan Kontekstual,” *Pendidikan / Mutu Pendidikan* 4, no. 1 (2011): 81.

<sup>58</sup> Suryosubroto, “Manajemen Pendidikan Di Sekolah,” in *Manajemen Pendidikan / Mutu Pendidikan* (Jakarta, 2010).

satuan pendidikan (Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003) Hal ini untuk menjadikan organisasi tetap bertahan dan terus melangsungkan kehidupannya, masalah mutu harus menjadi perhatian termasuk dalam bidang pendidikan.

Oleh karena itu, masalah mutu dalam dunia pendidikan harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah dan masyarakat. Mengingat masih diperlukan upaya yang serius guna meningkatkan mutu pendidikan serta persaingan global dalam bidang pendidikan yang menunjukkan kecenderungan makin meningkat dengan baik. Merosotnya mutu pendidikan di Indonesia secara umum dan mutu pendidikan secara spesifik dilihat dari persepsi masyarakat luas dapat disebabkan oleh buruknya sistem pendidikan nasional dan rendahnya sumberdaya manusia.

Menurut Soewarso, menyatakan bahwa, mutudapat didefinisikan sebagai karakteristik produk atau jasa yang ditentukan oleh customer dan diperoleh melalui pengukuran proses serta perbaikan yang berkelanjutan. Pendidikan yang bermutu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, dia merupakan hasil dari suatu proses pendidikan berjalan dengan baik, efektif dan efisien.<sup>59</sup>

Sedangkan menurut Joremo S. Arcaro, mutu adalah gambarandan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan out put

---

<sup>59</sup>Soewarso, "Total Quality Management," *Manajemen Mutu Terpadu* 4, No. 1 (1996): 7.

pendidikan.<sup>60</sup> Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, menjelaskan bahwa mutu pendidikan adalah merupakan kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor input agar menghasilkan out put yang setinggi-tingginya.<sup>61</sup>

Pada lingkungan sistem pendidikan, khususnya sekolah, penjaminan mutu merupakan tuntutan yang harus difokuskan oleh pihak sekolah demi kemajuan bersama. Hal ini didasarkan pada penyelenggaraan pendidikan yang bermutu merupakan hal yang menjadi sorotan utama oleh orang tua bahkan sampai ke tingkat satuan pendidikan pemerintah.

Mutu pendidikan harus diupayakan untuk mencapai kemajuan yang dilandasi oleh suatu perubahan terencana. Peningkatan mutu pendidikan diperoleh melalui dua strategi yaitu peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademis untuk memberi dasar minimal dalam perjalanan yang harus ditempuh mencapai mutu pendidikan yang dipersyaratkan oleh tuntutan zaman, dan peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada keterampilan hidup yang esensial yang dicakupi oleh pendidikan yang berlandaskan luas, nyata dan bermakna. Mutu pendidikan merupakan ukuran baik atau buruknya kualitas proses pendidikan dalam menghasilkan perubahan sikap dan perilaku individu atau kelompok.

---

<sup>60</sup> Joremo S. Arcaro, "Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penerapan," in *Manajemen Mutu Pendidikan* (2005).

<sup>61</sup> Ace Suryadi & H.A.R. Tilaar, "Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar," in *Kebijakan & Mutu Pendidikan* (1995).

## 2. Ukuran Pendidikan yang Bermutu

Pendidikan yang bermutu memiliki beberapa ukuran. Secara umum, pendidikan berkualitas menghasilkan lulusan yang kompeten, berakhlak mulia, dan memiliki kecakapan hidup (*life skill*). Selain itu, pendidikan bermutu juga ditandai dengan proses pembelajaran yang efektif, fasilitas yang memadai, serta dukungan dari guru, orang tua, dan masyarakat. Meti Fatimah menyatakan bahwa, ukuran pendidikan yang bermutu adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

### a. Kompetensi Lulusan

Lulusan memiliki kompetensi akademik dan kejuruan yang dilandasi oleh kompetensi personal, sosial, dan nilai-nilai akhlak mulia.

### b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran yang efektif, interaktif, dan berpusat pada siswa, didukung oleh fasilitas yang memadai dan penggunaan teknologi.

### c. Kualitas Guru

Guru yang kompeten, profesional, dan terus mengembangkan diri melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

### d. Fasilitas dan Sarana Prasarana

Sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran, seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet.

---

<sup>62</sup> Maulana Al Bana Pamungkas & Slamet Meti Fatimah, "Konsep Pendidikan Yang Bermutu Dalam Pengembangan Mutu Lembaga Sekolah," *TSAQOFAH* 5, no. 1 (2025): 525–36.

e. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan anak-anak dan program-program pendidikan di sekolah.

f. Evaluasi dan Monitoring

Dilakukan evaluasi dan monitoring berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan dalam sistem pendidikan.

g. Standar Nasional Pendidikan

Sekolah memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah, mencakup kurikulum, penilaian, guru, sarana prasarana, dan manajemen pendidikan.

h. Kecakapan Hidup (*Life Skills*)

Lulusan memiliki kecakapan hidup yang meliputi kemampuan beradaptasi, bekerja sama, memecahkan masalah, berpikir kritis, dan berkomunikasi.

i. Akhlak Mulia

Lulusan memiliki nilai-nilai akhlak mulia, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan toleransi.

j. Penguasaan Teknologi

Lulusan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari.

3. Indikator Mutu Pendidikan

Indikator mutu adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan

pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Dalam konteks pendidikan indikator mutu suatu pendidikan merupakan hasil pendidikan yang fokus pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Indikator mutu pendidikan mencakup berbagai aspek yang mencerminkan kualitas pembelajaran dan hasil pendidikan.<sup>63</sup>

Menurut Zamroni menyatakan bahwa, beberapa indikator utama meliputi prestasi akademik siswa, tingkat kelulusan, partisipasi siswa, kesejahteraan siswa, keterlibatan orang tua, kualitas pengajaran, kesiapan karir, dan keterampilan hidup. Selain itu, ada juga indikator yang berkaitan dengan *input, proses, output, dan outcome* pendidikan.<sup>64</sup>

a. Prestasi Akademik

Mencakup nilai ujian, hasil lomba, dan pencapaian siswa dalam berbagai mata pelajaran.

b. Tingkat Kelulusan

Persentase siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan pada setiap jenjang.

c. Partisipasi Siswa

Tingkat keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas.

d. Kesejahteraan Siswa Yang Mencerminkan Rasa Bahagia di Sekolah

Efektivitas manajemen keuangan diukur tidak hanya dari terserapnya anggaran sesuai rencana, tetapi juga dari lingkungan belajar yang nyaman, kegiatan yang beragam, dan meningkatnya rasa

---

<sup>63</sup> Zamroni, "Meningkatkan Mutu Sekolah: Teori, Strategi Dan Prosedur," *Manajemen Mutu Pendidikan / Sekolah Efektif* 3, no. 2 (2007): 109.

<sup>64</sup> Zamroni, "Meningkatkan Mutu Sekolah: Teori, Strategi Dan Prosedur."

bahagia di sekolah tersebut.

e. Keterlibatan Orang Tua

Seberapa aktif orang tua berpartisipasi dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka.

f. Kualitas Pengajaran

Kemampuan guru dalam menyampaikan materi pelajaran, menciptakan suasana belajar yang kondusif, dan memberikan umpan balik yang membangun.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan diantaranya adalah kepemimpinan Kepala Sekolah, yang efektif dapat menciptakan visi dan misi yang jelas, serta mampu memimpin dan memotivasi guru dan staf. Guru yang kompeten, profesional, dan berdedikasi tinggi merupakan kunci keberhasilan pendidikan. Kurikulum yang relevan, dinamis, dan terpadu dapat membantu mencapai tujuan pendidikan. Kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan memperhatikan indikator mutu pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat kualitasnya.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Juni Priansa Donni, "Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru," *Jurnal Kependidikan* 5, no. 2 (2017): 144–45.